

UPAYA PENCEGAHAN PERUNDUNGAN TERHADAP PESERTA DIDIK PROGRAM PENDIDIKAN DOKTER SPESIALIS

21

Dinar Wahyuni¹ dan Putu Ayu Dhana Reswari²

Abstrak

Indonesia darurat perundungan di lingkungan pendidikan dokter spesialis. Tulisan ini membahas fenomena perundungan terhadap peserta didik Program Pendidikan Dokter Spesialis dan upaya pencegahannya. Sistem hierarki yang membentuk budaya senioritas dan pengawasan profesionalisme senior dalam membimbing junior yang masih lemah membuka peluang terjadinya perundungan. Institusi pendidikan kedokteran memiliki peran strategis dalam upaya mencegah perundungan mulai dari menciptakan budaya yang mendorong rasa hormat dan penghargaan antarsejawat, menginisiasi perubahan kurikulum pendidikan dengan memasukkan nilai etik dasar dan penerapannya; menyosialisasikan nilai budaya akademik, kode etik, pedoman pencegahan dan penanganan perundungan; dan memperkuat pengawasan dengan membentuk komisi disiplin, etika, dan antikekerasan. Komisi IX DPR RI perlu mendesak pemerintah segera membuat peraturan pemerintah dengan memasukkan substansi anti perundungan di lingkungan pendidikan dokter spesialis. Komisi X DPR RI perlu mendorong Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, mengevaluasi secara menyeluruh sistem penyelenggaraan perguruan tinggi khususnya pendidikan dokter spesialis.

Pendahuluan

Pada 2 Agustus 2024, mahasiswa Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Fakultas Kedokteran di Universitas Diponegoro, Aulia Risma Lestari, meninggal dunia, diduga bunuh diri akibat perundungan

dan beban kerja ("Dokter PPDS Undip", 2024). Sebelumnya, kasus perundungan dilakukan dokter pengajar (konsulen) terhadap peserta didik (residen) di lingkungan pendidikan dokter spesialis bedah saraf, Universitas Padjadjaran. Plt



¹ Analis Legislatif Ahli Madya Bidang Kesejahteraan Rakyat pada Pusat Analisis Legislatif Badan Keahlian DPR RI. Email: dinar.wahyuni@dpr.go.id.

² Analis Legislatif Ahli Pertama Bidang Kesejahteraan Rakyat pada Pusat Analisis Legislatif Badan Keahlian DPR RI. Email: putu.reswari@dpr.go.id



Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kementerian Kesehatan, Siti Nadia Tarmizi, membenarkan adanya aksi perundungan tersebut (“Ada Bullying di PPDS”, 2024).

Perundungan di lingkungan pendidikan dokter spesialis merupakan masalah serius yang seringkali tidak tampak di permukaan tetapi berdampak signifikan pada kesehatan mental, kinerja, dan kesejahteraan peserta didik. Sejak 2023, sebanyak 1.200 kasus perundungan di lingkungan pendidikan dokter spsialis telah dilaporkan ke Kementerian Kesehatan (Arlinta, 2024). Bentuk perundungan meliputi nonfisik dan nonverbal, seperti pemaksaan jam kerja berlebihan atau penugasan di luar kewajiban akademis yang wajar.

Ironis, lingkungan pendidikan kedokteran yang seharusnya sarat akan pentingnya nyawa manusia, menjadi arena perundungan. Perundungan tidak hanya berdampak negatif bagi kesehatan mental dan fisik residen, namun juga dapat menimbulkan dampak buruk jangka panjang bagi pasien, tim pemberi pelayanan, institusi, dan keluarganya. Tindakan tegas diperlukan agar praktik perundungan di PPDS dapat dihentikan. Tulisan ini membahas fenomena perundungan terhadap peserta didik PPDS dan upaya pencegahannya.

Fakta di Balik Perundungan terhadap Peserta Didik PPDS

PPDS di Indonesia merupakan tahap lanjutan bagi para dokter untuk memperdalam pengetahuan dan keterampilan klinis dalam bidang spesialisasi tertentu. Lingkungan belajar dalam program ini sangat unik karena melibatkan interaksi intens antara dokter junior (residen) dengan dokter senior yang lebih berpengalaman.

Residen tidak hanya belajar melalui kuliah dan seminar, tetapi juga dengan terjun langsung dalam praktik klinis di rumah sakit.

Lingkungan belajar PPDS juga menghadirkan tantangan signifikan. Peserta didik harus siap dengan proses pendidikan yang kompetitif, padat, dan cenderung feodal. Tuntutan proses pendidikan yang mayoritas praktik langsung menangani pasien di rumah sakit pendidikan, menciptakan hierarki residen terhadap senior yang lebih berpengalaman. Hierarki yang kuat antara dokter senior dan junior (senioritas) menciptakan suasana yang tidak selalu kondusif untuk proses pembelajaran yang mendukung, terutama jika terdapat dugaan praktik perundungan.

Senioritas bersifat struktural dan formal karena senior memiliki peran aktif dalam supervisi klinis dan pengajaran. Senioritas dalam program dokter spesialis mencakup otoritas yang besar dalam pengambilan keputusan serta bimbingan teknis yang sangat memengaruhi pengalaman dan pembelajaran residen junior. Senioritas juga memengaruhi seluruh aspek kehidupan residen, dari beban kerja hingga kesehatan mental karena senior memiliki wewenang yang besar dalam penugasan klinis (Husada & Singgih, 2024). Senioritas yang berlebihan akan mengarah pada bentuk perundungan.

Studi di Australia (2020) tentang *bullying* dan *harassment* di lingkungan medis menggambarkan, salah satu penyebab perundungan mengakar di dunia medis adalah hierarki. Sistem hierarki memang tidak selamanya berdampak negatif, tetapi ketika ada oknum menyalahgunakan sistem, menyebabkan posisi terbawah (junior) seolah seperti pelayan. Hierarki akan memudahkan junior yang kemudian

menjadi senior untuk melanjutkan sistem. *Intellectual humiliation* yang dialami para korban perundungan juga dapat mengubah nilai-nilai yang dimiliki dan menyesuaikannya dengan pelaku perundungan untuk bertahan hidup. Hal ini menyebabkan budaya perundungan terus bertahan (Collenbrander et al., 2020).

Perundungan peserta didik pada PPDS ibarat penyakit yang sulit dihilangkan. PPDS yang diwarnai oleh tingkat tekanan dan stres yang tinggi, baik dari beban akademis maupun tuntutan klinis memicu perilaku perundungan sebagai cara mengekspresikan kekuasaan atau mengurangi tekanan yang dirasakan (Assri, 2024). Perundungan dilakukan dengan cara terstruktur sehingga modus pembentukan karakter biasa menjadi alasan pembenaran tindakan.

Faktor pengawasan yang lemah juga menyebabkan aksi perundungan terus terjadi. Intimidasi senior kepada junior membuat korban takut melapor karena akan berdampak pada proses pendidikan. Pihak institusi pendidikan, rumah sakit pendidikan, maupun organisasi profesi juga dinilai belum dapat memberikan perlindungan yang memadai kepada korban perundungan. Akibatnya, perundungan hanya akan berhenti sejenak pada saat ada laporan.

Upaya Mencegah Perundungan terhadap Peserta Didik PPDS

Meningkatnya laporan kasus perundungan di PPDS memerlukan pendekatan yang sistematis untuk pencegahannya. Institusi pendidikan kedokteran memiliki peran strategis dalam mencegah perundungan di kalangan peserta didik. Institusi harus mampu menciptakan budaya yang mendorong rasa hormat dan penghargaan antarsejawat. Upaya

tersebut dapat dimulai dari hal sosial-emosional dengan mengedukasi staf pengajar dan seluruh sivitas akademika tentang paradigma kesetaraan dalam pendidikan dan etika kedokteran antarsejawat. Pengajar dan senior harus dapat menjadi *role model* dalam upaya memperkecil peluang terjadinya perundungan (Rozaliyani, 2019).

Institusi pendidikan kedokteran dapat bekerja sama dengan Majelis Kehormatan Etik Kedokteran (MKEK) menginisiasi perubahan kurikulum pendidikan dengan memasukkan nilai-nilai etik dasar serta penerapannya secara bertahap dan sistematis (Rozaliyani, 2019). Sosialisasi nilai-nilai budaya akademik, etika profesi, kode perilaku, dan pedoman terkait pencegahan dan penanganan perundungan baik di institusi pendidikan maupun rumah sakit pendidikan juga perlu dilakukan secara berkala, sesuai amanat Instruksi Menteri Kesehatan RI No. HK.02.01/MENKES/1512/2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Perundungan terhadap Peserta Didik Pada Rumah Sakit Pendidikan di Lingkungan Kemenkes. Tujuannya untuk menumbuhkan kesadaran setiap individu agar tidak terlibat perundungan dan melawan segala bentuk perundungan.

Institusi pendidikan kedokteran juga harus memiliki kebijakan yang jelas tentang perundungan dan tindakan yang akan diambil jika ada pelanggaran. Kebijakan anti-perundungan harus mencakup prosedur pelaporan yang jelas dan rahasia, serta menjamin bahwa tidak ada tindakan balasan atau dampak negatif terhadap pelapor. Selain itu, penting untuk mendokumentasikan insiden secara cermat dan memastikan bahwa kebijakan berlaku bagi seluruh sivitas

akademika, termasuk mahasiswa, staf medis, dan tenaga pendukung. Dengan demikian diharapkan kasus perundungan peserta didik PPDS dapat ditekan sehingga tercipta lingkungan belajar yang lebih sehat dan produktif.

Perlu ditetapkan definisi yang jelas tentang perundungan di lingkungan pendidikan kedokteran. Berdasarkan Instruksi Menteri Kesehatan RI No. HK.02.01/MENKES/1512/2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Perundungan terhadap Peserta Didik pada Rumah Sakit Pendidikan di Lingkungan Kemenkes, perundungan adalah segala tindakan yang merugikan peserta didik yang dilakukan oleh satu orang atau sekelompok orang di luar atau yang tidak berhubungan dengan proses pendidikan, penelitian atau pelayanan. Definisi tersebut belum spesifik menjelaskan batasan suatu tindakan termasuk kategori perundungan. Selama ini perundungan sering dijustifikasi sebagai pembinaan disiplin supaya peserta didik lebih tahan mental dan tidak dilihat sebagai tindakan yang merugikan peserta didik.

Terakhir, pengawasan terhadap profesionalisme dokter senior dalam membimbing junior perlu diperketat. Institusi pendidikan kedokteran dapat bekerja sama dengan rumah sakit pendidikan membentuk komisi disiplin, etika, dan antikekerasan. Komisi ini akan bertugas melakukan pembinaan moral, etik, dan memastikan pelaksanaan kode etik dan kode perilaku sivitas akademika. Komisi juga akan memantau kondisi mental anggota PPDS khususnya peserta didik secara berkala. Selain itu, komisi menjadi saluran pengaduan korban perundungan. Dengan adanya komisi tersebut, diharapkan dapat memberikan perlindungan bagi peserta didik di lingkungan PPDS.

Penutup

Kasus perundungan di lingkungan PPDS terus mendapat perhatian. Sistem hierarki yang membentuk budaya senioritas dan pengawasan profesionalisme senior dalam membimbing junior yang masih lemah semakin membuka peluang terjadinya perundungan. Institusi pendidikan kedokteran memiliki peran strategis dalam upaya mencegah perundungan mulai dari menciptakan budaya yang mendorong rasa hormat dan penghargaan antarsejawat, menginisiasi perubahan kurikulum pendidikan dengan memasukkan nilai etik dasar dan penerapannya; sosialisasi nilai budaya akademik, kode etik dan perilaku serta pedoman pencegahan dan penanganan perundungan; serta memperkuat pengawasan melalui kerja sama dengan rumah sakit pendidikan membentuk komisi disiplin, etika, dan antikekerasan.

Melalui fungsi legislasi, Komisi IX DPR RI perlu mendesak pemerintah segera membuat peraturan pemerintah dengan memasukkan substansi anti perundungan di lingkungan pendidikan kedokteran. Komisi X DPR RI melalui fungsi pengawasan perlu mendorong Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, mengevaluasi secara menyeluruh sistem penyelenggaraan perguruan tinggi khususnya pendidikan dokter spesialis.

Referensi

Ada bullying saraf, RSHS pelaku ke FK Unpad. (2024, Agustus 16). *CNN Indonesia*. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20240816182139-20-1134014/ada-bullying-di-ppds-bedah-saraf-rshs-kembalikan-pelaku-ke-fk>

- unpad
- Arlinta, D. (2024, Agustus 18). Kemenkes terima 1.200 pengaduan terkait "bullying" pendidikan dokter spesialis. *Kompas*. <https://www.kompas.id/baca/humaniora/2024/08/18/1200-pengaduan-perundungan-dilaporkan-oleh-ppds-perlu-perbaiki-tata-kelola-pendidikan>
- Assri, B.C.A. (2024, April 20). Budaya perundungan dalam pendidikan dokter spesialis: Tantangan dan solusi. *Kompasiana*. <https://www.kompasiana.com/sudutrefleksi/662346dfde948f3d7464fd53/budaya-perundungan-dalam-pendidikan-dokter-spesialis-tantangan-dan-solusi>
- Colenbrander, L., Causer, L., & Haire, B. (2020). If you can't make it, you're not tough enough to do medicine': a qualitative study of Sydney-based medical students' experiences of bullying and harassment in clinical settings. *BMC Medical Education*. 20(1): 86. <https://doi.org/10.1186/s12909-020-02001-y>
- Dokter PPDS Undip diduga bunuh diri karena perundungan dan beban kerja yang berat. (2024, Agustus 17). *BBC News Indonesia*. <https://www.bbc.com/indonesia/articles/c8erp421xj1o>
- Husada, T., & Singgih, V. (2024, April 17). Pendidikan calon dokter spesialis yang berat dan dirundung: "Saya depresi." BBC. <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cyj3mkp7jl0o>
- Instruksi Menteri Kesehatan RI Nomor HK.02.01/MENKES/1512/2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Perundungan terhadap Peserta Didik pada Rumah Sakit Pendidikan di Lingkungan Kemenkes.
- Rozaliyani, A., Wasisto, B., Santosa, F., Sjamsuhidajat, R., Setiabudy, R., Prawiroharjo, P., Baharudin, M., & Sulaiman, A. (2019). Bullying (perundungan) di lingkungan pendidikan kedokteran. *Jurnal Etika Kedokteran*. 3(2): 56-60. <https://doi.org/10.26880/jeki.v3i2.36>
- Susanto, L. (2024, April 19). Infografik: Beban mental calon dokter spesialis Indonesia. *Katadata*. <https://katadata.co.id/infografik/662223e30d79e/infografik-beban-mental-calon-dokter-spesialis-indonesia>